



Apindo: Bantuan Subsidi Upah Semestinya Sampai Akhir Tahun

YOGYA, TRIBUN - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto menyebut besaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja terlalu kecil.

Pemerintah memberikan BSU sebesar Rp300.000 per bulan untuk bulan Juni dan Juli 2025. Bantuan tersebut disalurkan dalam satu tahap, sehingga setiap pekerja akan mendapat BSU sebesar Rp600.000.

"Pertama saya mengapresiasi kebijakan pemerintah. BSU ini menjadi kebijakan untuk menaikkan daya beli masyarakat. Tetapi, *enggak cukup signifikan, Rp300.000 itu paling habis* untuk konsumsi atau komunikasi atau lainnya, *enggak cukup mendorong daya beli pekerja*," katanya, Rabu (11/6).

Menurut dia, BSU paling tidak diberikan Rp600.000 per bulan, dengan jangka waktu enam bulan, dari Juni hingga Desember 2025. Di sisi lain, klasifikasi penerima upah juga kurang tepat, pasalnya hanya menasar pekerja dengan gaji Rp3.500.000 ke bawah. Untuk beberapa wilayah, pekerja dengan gaji hingga Rp5.000.000 masih tergolong kelompok rentan.

"Mestinya seperti Covid-19 kemarin, gaji di bawah Rp5.000.000 itu juga menerima BSU. Sehingga, sasaran BSU tidak hanya 17,3 juta, mestinya lebih banyak," terangnya.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan BSU hanya diberikan dua bulan dengan

nominal Rp300.000. Untuk itu, pemerintah mestinya melakukan *refocusing* anggaran dan membuat kajian terkait program-program mana saja yang bisa dielstienkan. Ia menilai kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial.

Pendapat lain dikemukakan oleh peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, yang menilai pemberian BSU sebagai kebijakan yang positif dan sasarannya sudah tepat. Sebab, pekerja dengan gaji Rp 3.500.000 ke bawah merupakan kelompok pekerja rentan.

Selain meringankan beban, pemberian BSU juga akan meningkatkan daya beli pekerja.

"Dengan upah yang lebih tinggi, daya beli masyarakat akan meningkat, dan harapannya akan memutar ekonomi secara keseluruhan, termasuk UMKM dan lainnya. Bisa berpotensi menggerakkan UMKM, meskipun tidak besar, tetapi kan harapannya bisa jadi penggerak ekonomi," katanya.

Namun begitu, ia menyebut perlu ada rencana jangka panjang untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya menumbuhkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, termasuk upaya meningkatkan daya beli masyarakat secara umum. Pemerintah bisa mengembangkan sektor-sektor informal, sehingga pekerja bisa memiliki pekerjaan sampingan untuk meningkatkan perekonomian. (maw)